

**PENAMBAHAN JUMLAH KEMENTERIAN DALAM UNDANG UNDANG
NOMOR 61 TAHUN 2024 PERSPEKTIF *GOOD GOVERNANCE***

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Magister dalam Program Studi Hukum Tata Negara



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Oleh
Ifa Nur Azizah
NIM : 02040424008

**PRODI MAGISTER HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Ifa Nur Azizah
NIM : 02040424008
Prodi : Magister Hukum Tata Negara
Judul Tesis : Penambahan Jumlah Kementerian Dalam Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 Perspektif *Good Governance*

Dengan sungguh-sungguh memberikan pernyataan bahwa TESIS ini seluruhnya adalah hasil riset dan/atau ciptaan sendiri, selain pada poin-poin yang dengan jelas dirujuk sumbernya.

Surabaya, 2 Desember 2025



NIM.02040424008

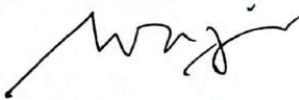
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Nama : Ifa Nur Azizah
NIM : 02040424008
Prodi : Magister Hukum Tata Negara
Judul Tesis : Penambahan Jumlah Kementerian Dalam Undang-
Undang Nomor 61 Tahun 2024 Prespektif *Good Governance*

telah diperiksa dan disetujui untuk mengikuti ujian

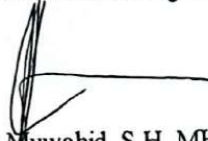
Surabaya, 2 Desember 2025

Dosen Pembimbing I



Prof. Dr. Sri Warjiyati, MH
NIP.196808262005012001

Dosen Pembimbing II



Dr. Muwahid, S.H., MH.
NIP.197803102005011004

PENGESAHAN PENGUJIAN

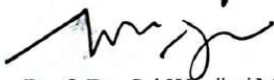
Tesis yang ditulis oleh :

Nama : Ifa Nur Azizah
NIM : 02040424008

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Tesis Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari Selasa 23 tanggal Desember 2025 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata dua dalam program studi Magister Hukum Tata Negara.

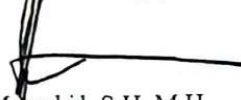
Majelis Sidang Munaqasah Tesis :

Ketua Penguji



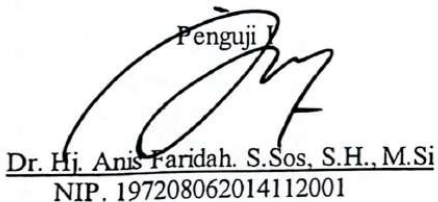
Prof. Dr. Sri Warjati, M.H.
NIP. 196808262005012001

Sekretaris Penguji



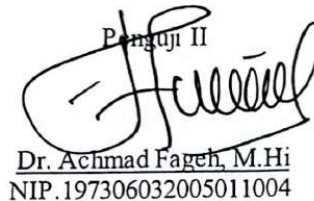
Dr. Muwahid, S.H., M.H.
NIP. 197803102005011004

Penguji I



Dr. Hj. Anis Faridah, S.Sos, S.H., M.Si.
NIP. 197208062014112001

Penguji II



Dr. Achmad Fageh, M.Hi.
NIP. 197306032005011004

Surabaya, 23 Desember 2025

Mengesahkan
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Dekan,



Dr. H. Saifullah Mufarrah, M.Ag.
NIP. 196303271999032001

PERNYATAAN PUBLIKASI

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ifa Nur Azizah
NIM : 02040424008
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum
E-mail address : iffaazizah529@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☐ Sekripsi ☒ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

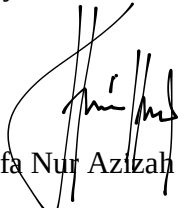
yang berjudul :

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Desember 2025



Ifa Nur Azizah

ABSTRAK

Dalam Undang Undang Dasar 1945 presiden dibantu oleh menteri menteri dan Undang undang yang mengatur tentang kementerian negara dijelaskan melalui Undang Undang Nomor 38 Tahun 2008 dan kini berubah menjadi Undang undang Nomor 61 Tahun 2024 di mana permasalahan dari perubahan undang undang ini adalah penghapusan jumlah batas maksimal kementerian pada pasal 15 dan pada masa kabinet merah putih kementerian mengalami penambahan jumlah kementerian cukup besar hal ini menimbulkan problematik tentang bagaimana *ratio legis* penyusunan Undang undang Nomor 61 Tahun 2024 dan bagaimana analisis penambahann jumlah kementerian Undang Undang Nomor 61 Tahun 2024 dalam prespektif *good governance* serta adakah politik hukum dalam penambahan kementerian tersebut, sehingga penulis menganalisis dengan jenis penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan beberapa pendekatan seperti *Statuta Approach*, *Historical Approach*, dan *Comperative Approach* serta bahan hukum primer, sekunder dan juga tersier sehingga mendapatkan hasil bahwa *Ratio Legis* atau latar belakang pemebntukan atau perubahan peraturan perundang-undangan tentang kementerian menjadi suatu pertanyaan yang perlu dibahas di mana tahapan dalam perubahan undang-undang harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 lalu apa tujuan dari perubahan Undang-undang kementerian nomor 39 Tahun 2008 yang kini berubah menjdai Undang-undang Nomor 61 Tahun 2024 semua itu dapat dilihat dari naskah akademik kementerian di mana memuat *ratio legis* perubahan Undang Undang kementerian dilihat dari filosofi, Sosiologis dan yuridis. Dalam landasan filosofis menyebutkan bahwa di mana presiden dibantu oleh menteri dan penambahan menteri ini dapat mempercepat dan memperlancar kerja sesuai dengan target dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Dalam landasan sosiologis menyatakan bahwa indonesia luas dan majemuk maka untuk mempercepat pelayanan maka perlunya penambahan kementerian dan secara yuridis menyatakan bahwa karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi. Sedangkan menurut perspektif *good governance* kurangnya penerapan prinsip-prinsip dalam kementerian sebagai contoh APBN setiap presiden dalam satu tahun pertama menjadi presiden menyatakan tahun 2025 merupakan anagaran tertinggi dan bertentangan dengan Inpres nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi negara.

Keyword : Kementerian, *ratio legis*, *Good Governance*, dan politik hukum

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

ABSTRACT

In the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the President is assisted by ministers, and the law governing state ministries was initially regulated under Law Number 38 of 2008, which has now been amended into Law Number 61 of 2024. The main issue arising from this amendment is the removal of the maximum limit on the number of ministries as stipulated in Article 15. During the Red and White Cabinet era, there was a significant increase in the number of ministries, which raises several legal issues, particularly concerning the ratio legis behind the enactment of Law Number 61 of 2024, the analysis of the increase in the number of ministries from the perspective of good governance, and whether there is a legal-political dimension (politics of law) behind the addition of these ministries. Therefore, this study employs normative legal research using several approaches, including the Statutory Approach, Historical Approach, and Comparative Approach, supported by primary, secondary, and tertiary legal materials. The findings indicate that the ratio legis, or the background and rationale for the formation or amendment of legislation concerning state ministries, remains a crucial issue that requires further discussion. The stages of amending legislation must comply with Law Number 12 of 2011. Furthermore, the objectives of amending Law Number 39 of 2008, which has now been changed into Law Number 61 of 2024, can be identified through the academic manuscript (naskah akademik) of the Ministry, which outlines the ratio legis of the amendment from philosophical, sociological, and juridical perspectives. From a philosophical standpoint, it is stated that the President is assisted by ministers, and the addition of ministers is intended to accelerate and facilitate governmental performance in accordance with predetermined targets and timelines. From a sociological perspective, Indonesia's vast and pluralistic nature necessitates the addition of ministries in order to improve and accelerate public services. Juridically, the amendment is justified by the existence of a Constitutional Court decision. However, from the perspective of good governance, there is a lack of implementation of governance principles within ministries. For example, the State Budget (APBN) in the first year of a presidential term, namely in 2025, is declared to be the highest budget allocation, which contradicts Presidential Instruction Number 1 of 2025 concerning state efficiency.

Keywords: Ministries, ratio legis, Good Governance, legal politics

UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

DAFTAR ISI

Cover Dalam	ii
Pernyataan Keaslian	iii
Persetujuan Dosen Pembimbing.....	iv
Pengesahan Pengujian	v
Pernyataan Publikasi	vi
Motto	vii
Abstrak	viii
Abstract.....	ix
Kata Pengantar	x
Daftar Isi.....	xi
Daftar Transliterasi.....	xiii
Bab I	1
Pendahuluan.....	1
A. Latar Belakang.....	1
A. Identifikasi Dan Batasan Masalah	3
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Masalah	4
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Kerangka Teoritik.....	4
F. Penelitian Terdahulu	18
G. Metode Penelitian	20
H. Sistematika Penelitian	22
Bab II.....	24
Hak Prerogatif Presiden Dan Penegakan Prinsip-Prinsip Good Governance	24
A. Hak <i>Prerogatif</i> Presiden.....	24
B. <i>Good Governance</i>	31
C. Kewenangan Presiden Dalam Kementerian	39
Bab III.....	44
Penambahan Jumlah Kementerian Undang Undang Nomor 61 Tahun 2024 Dalam Perspektif Prinsip <i>Good Governance</i>	44

A. Penerapan <i>Good Governance Principles</i> Dalam Penambahan Jumlah Kementerian	44
B. Perbandingan Jumlah Kementerian Negara-Negara Lain	54
C. Kesesuaian Antara Kebijakan Efisiensi Anggaran Negara Dengan Penambahan Jumlah Kementerian.....	66
Bab IV	76
<i>Ratio Legis</i> Undang Undang Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Kementerian	76
A. <i>Ratio Legis</i> Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Perubahan Undang Undang Kementerian	76
B. Hak Prerogatif Presiden Dalam Pengangkatan Dan Pemberhentian Menteri 87	
C. Politik Hukum Dalam Perubahan Undang-Undang Kementerian	89
Bab V.....	98
Kesimpulan Dan Saran	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran	99
Daftar Pustaka	100
Lampiran.....	109

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

Undang Undang

- Menteri Keuangan, 'Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga', *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021*, 2021, 53
- Undang-undang republik indonesia nomor 6i tahun 2024 tentang perubahan atas undang-undang nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara dengan*, 2015, pp. 1–6
- UU republik indonesia nomor 39, 'uu republik indonesia nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara', *republik indonesia*, 2008
- Indoesia, *Undang-Undang Dasar 1945*
- Indonesia, *Instruksi Presiden Republik INDONESIA Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025*, 2025
- Indonesia, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara*, 2024
- Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2024 Tentang Penataan Tugas Dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2025*, 2024
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011*
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik*
- Indonesia, *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah*
- Indonesia, *UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA*
- Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2015', *IOSR Journal of Economics and Finance*, 2014
- Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020*, 2019
- Indonesia, *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA*, 2008
- Indonesia, *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6I TAHUN*

2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 39
TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA DENGAN, 2024, pp. 1–
6

Indonesia, *Undang Undang Nomor 19 Tahun 2001 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2002*, 2001

Indonesia, *Undang Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi*, 2002

Indonesia, *Undang Undang Nomor 35 Tahun 2000 Tentang Anggran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2001*, 2000

Indonesia, *Undang Undang Nomor 36 Tahun 2004 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2005*, *Demographic Research*, 2004

Indonesia, *Undang Undang Nomor 47 Tahun 2009 Tentang Anggaran Penndapatan Dan Belanja Negara Tahun 2010*, 2010

Indonesia, *Undang Undang Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Grasi*, 2010

Indonesia, *Undang Undang Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2025*, 2024

Indonesia, *UU Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara*, *Republik Indonesia*, 2008

Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 143 Tahun 2024 Tentang Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian*, 2024

Indonesia, 'Perpres Nomor 147 Tahun 2024 Tentang Kementerian Koordinator Bidang Pangan', 247580, 2024, 1–19

Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2024 Tentang Penataan Tugas Dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Merah Putih Periode Tahun 2024-2025*, 2024

Buku

Achamad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Sosiologis Dan Filosofis)* (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 2002)

Amiruddin dan zainal asikin, *pengantar metode penelitian hukum* (jakarta: pt raja grafindo persada, 2004)

Anggriani Jum, *Hukum Administrasi Negara* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012)

Asshiddiqie, Jimly, *Perihal Undang-Undang* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011)

- Dwiyanto, *Tata Pengelolaan Pemerintahan Yang Baik* (Jakarta: CV. Bina Cipta Pustaka Press, 2004)
- Efendi A'an dkk, *Hukum Administrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)
- Emei, setiamandani. "*sistem hukum indonesia*". (malang: pt. Literasi nusantara abadi group, 2023)
- HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Rajawali Pers, 2008)
- Kementerian Negara, *Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama* (Jakarta: Reformasi Birokrasi Nasional, 2008)
- Kusumohamidjojo, Budiono, *Teori Hukum : Dilema Antara Hukum Dan Kekuasaan* (Bandung: Yrama Wijaya, 2016)
- Latif Abdul Dan Ali Hasbi, *Politik Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- lutfil Ansori, *Legal Drafting Teori Dan Praktik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan* (Depok: Rajawali Pers, 2019)
- Mahfud M.D, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, ed. by Rajawali pres (Jakarta, 2010)
- Mahfud M.D, *Politik Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Mahfud M.D,, *Politik Hukum Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012)
- Mahkamah konstitusi. "*naskah komprehensif perubahan uud 1945: buku iv kekuasaan pemerintah negara jilid i*". (jakarta: sekretariat jenderal dan kepaniteraan mahkamah konstitusi, 2010)
- Mahmud marzuki peter. "*penelitian hukum edisi revisi*". (surabaya: kencana, 2005)
- Makhfudz, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Graha Ilmu, 2013)
- Makmur, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. (Bandung: Refika Aditama, 2011)
- Muhtar Haboddin, *Pengantar Ilmu Pemerintahan* (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2015)
- Muhtar haboddin. "*pengantar ilmu pemerintahan*". (malang: universitas brawijaya press, 2015)
- Parbuntian sinaga, *eksistensi menteri negara dalam sistem pemerintahan pasca amandemen 1945* (tangerang: pt. Pustaka mandiri, 2022)
- Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan Yang Baik)* (Bandung: Mandar Maju, 2007)

- Soejono Soekanto dan Purnadi, *Kaidah Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993)
- Sumarto, *Inovasi, Partisipasi Dan Good Governance* (Jakarta: Yayasan Obor, 2003)
- Solikhudin Muhammad, *Good Governance (Mengurai Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dengan Pendekatan Maqasid Al-Shari'ah)* (Yogyakarta: Bintang Semesta Media, 2022)
- Taufiqurokhman dan Evi Satispi, *Teori Dan Perkembangan Manajemen Pelayanan Publik*. (Tangerang: UMJ Press, 2018)
- Tjandra Riawan, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018)
- Tutik, Titik Triwulan, *Hukum Tata Usaha Negara Dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2011)
- Tutik, titik triwulan, *konstruksi hukum tata negara pasca amandemen uud 1945* (jakarta: prenadamedia, 2015)
- Wijaya, *Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik* (Semarang: Pustaka Magister, 2018)
- World Bank, *Governance and Development* (Washington, 1992)
- zainal Arifin Mochtar, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang* (Sleman: Buku Mojok Grup, 2022)
- Zaman, Ali Noer, 'Kemunculan Jokowi Di Kontestasi Politik Nasional', *KAIS: Kajian Ilmu Sosial*, 1.1 (2020)

Jurnal

- Ardiansyah, khairi, septrian azeri. "kewenangan presiden dalam membentuk kabinet menteri menurut undang-undang nri tahun 1945 dan undang-undang no. 38 tahun 2008 tentang kementerian negara". 3.12 (2024)
- Ady supryadi dkk, 'reformasi kementerian negara (tinjauan yuridis dan implementasinya dalam pemerintahan presiden prabowo subianto)', november, 2024, 2455–61
- Afrizal, mohammad, fakultas hukum, univeristas trunojoyo, melkiardo febian tagung, fakultas hukum, univeristas trunojoyo, and others, 'reshuffle kabinet dalam sistem universitas trunojoyo madura universitas trunojoyo madura', 5 november (2024), 16–27
- Alti Putra, Moh Alfatah, 'Bentuk Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemerintah Yang Tidak Dapat Dipidana', *Justisi*, 7.2 (2021), 118–36
<https://doi.org/10.33506/js.v7i2.1362>

- Al Asy'arie, Mohammad Asadullah Hasan, and Widhi Handoko, 'Rasio Legis Perbuatan Tercela Sebagai Dasar Pemberhentian Sementara Pejabat Pembuat Akta Tanah', *Notarius*, 16.2 (2023), 998–1012
- Aantoro Bibianus, Miladmahesi Rosita, 'Mengukur Dan Menanggulangi Kompleksitas Hak Prerogatif Presiden Pada Pengangkatan Menteri Dalam Kabinet', 1–18
- Astomo, Putra, 'Penerapan Prinsip-Prinsip Pemerintahan Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan', *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 64, 2014, 401–20
- Arfa'i, 'Bentuk Negara Republik Indonesia Ditinjau Pengaturan Tentang Pemerintahan Daerah Dalam Peraturan Perundang-Undangan', *Jurnal Ilmu Hukum*, 6.7 (2013)
- Arsik, Faisal Selfianti dan Lewalai Herman, 'Penerapan Akuntabilitas, Efektivitas, Dan Transparasi Dalam Mewujudkan Good Governance : Studi Pemerintah Desa Banabungi', *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 1.1 (2020), 1–7
- Bolang Jeane, 'Penerapan Prinsip Akuntabilitas DanTransparansiDalamPenyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik', 2 (2014), 36–45
- Christin, Nathania dkk, 'Kedudukan Kementerian Negara Dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia', 2008
- Darmanerus Duarmas, Patar Rumapea, Welson Yappi Rompas, 'Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Camat Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat', *Jurnal Administrasi Publik*, 1.37 (2016), 1–9
- Huda Ni'matull, 'Hak Prerogatif Presiden Dalam Prespektif Hukum Tata Negara Indonesia', *Jurnal Hukum*, 8 (2001)
- Ihwanul Muttaqin, 'Kontrol Pemerintah Terhadap Pemberantasan Korupsi Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Hukum*, 4.02 (2020), 87
- Ismail, M., 'Struktur Pemerintahan Dan Konsep Kabinet Dalam Sistem Politik Belanda', *Jurnal Politik Dan Pemerintahan*, 22.3 (2018)
- Kamus Berar Bahasa Indonesia*
- Kansil, Christine S.T., and Calinka Princess Belinda Laapen, 'Kewenangan DPR Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi Berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) UU Dasar Negara Republik Indonesia 1945', *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, Vol. 15.No. 2 (2018), 65
- Marlina Lestari, Maylyndha, 'Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Tata Negara Dalam Membangun Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)',

- PESHUM: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Humaniora*, 4.2 (2025), 3639–48
- MENTERI KEUANGAN, 'Pengukuran Dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga', *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021*, 2021, 53
- Molki Akhmad, 'Analisis Perbandingan Administrasi Publik Negara China Dan Rusia', *Journal of History and Social Sciences*, 3.4 (2024), 63
<<https://doi.org/10.24853/penta.1.1.63-79>>
- MPR, *Penataan Sistem Presidensial* (Jakarta: Badan Pengkaji MPR RI, 2019)
- Nurmala Adi sheila dan Hadi Pratisara Candrika, 'Meneropong Efektivitas Dan Efisiensi Kabinet Koalisi Merah Putih Terhadap Tata Kelola Pemerintahan', *Jurnal Ilmu Hukum*, 9.4 (2025), 912–21
- Octovina, Ribkha Annisa, 'Sistem Presidensial Di Indonesia', *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Vol.4,No.2 (2018)
- Pemerintah Indonesia, *Tata Tertib DPR RI Tahun 2020*, 2020
- Pramesti Farah Retta, Firdaus Azzawagama Asmo, 'Analisis Efisiensi APBN Era Prabowo: Kajian Ekonomi Dan Analisis Sentimen Publik', *Jesya*, 8.2 (2025), 1147–61
- Prasetyo, B., 'Keahlian Dan Profesionalisme Dalam Penunjukan Menteri Pada Kabinet Pemerintahan Indonesia', *Jurnal Administrasi Negara*, 20.4 (2019)
- Program, United Development, *Governance for Sustainable Human Development* (New York, 1997)
- Purba Sunarty Irma dan Djamin Djanius, 'Partisipasi Masyarakat Dalam Meningkatkan Good Governance Di Tingkat Desa', *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik*, 3.1 (2015), 25–36
- Qamar, Nurul, and Farah Syah Rezah, 'Wewenang Sebagai Instrumen Penyelenggaraan Pemerintahan Dalam Sistem Negara Hukum', *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, 2.2 (2023), 201–22
- Rachmayanti, Siti Deliana .dkk, 'Penerapan Prinsip Efisiensi Dan Efektivitas Dalam Pendaftaran Penduduk Melalui Website Sintren Sebagai Perwujudan Prinsip Good Governance', 5.1 (2022), 75–89
- Rahmasari Betha, 'Mekanisme Dan Dasar Keberlakuan Legal Drafting', 13 (2016)
- Resmadiktia, Nedia Martha, Yusuf Dwi Utomo, and Laode Muhammad Aiman, 'Pertanggungjawaban Pemerintah Dalam Mewujudkan Good Governance Sesuai Hukum Administrasi Negara', *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9.11 (2023), 685–97

- Sanur Debora dan Ivan Vincent Jeffrey, 'Implikasi Perubahan Undang-Undang Kementerian Negara Terhadap Struktur Pemerintahan', 2025
- Sejati, Sidiq Budi, "Menilik Arah Reformasi Birokrasi Pada Pemerintahan Prabowo Gibran." *Info Ringkas: Kajian Ringkas Atas Isu Aktual Serta Strategis*, 16.19 (2024)
- Setiawan, Irfan, 'Penerapan Sistem Pemerintahan Indonesia Ditinjau Dari Pendekatan Berbasis Teori Maupun Praktik', *Ejournal.Ipdn.Ac.Id*, 2021, 49–59
- Soejono Soekanto dan Purnadi, *Kaidah Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993)
- Sugianto Bambang, 'Hukum Administrasi Negara Sejarah Hukum Administrasi Negara', *Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, 2022, 1
- Wahyu Widodo dkk, *Politik Hukum : Membangun Nilai Dasar Mahkamah Kehormatan Dewan Terhadap Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nilai Berdasarkan Nilai Keadilan Pancasila* (Semarang: Universitas PGRI Semarang Press, 2016)
- Ihwanul muttaqin, "kontrol pemerintah terhadap pemberantasan korupsi di indonesia", *jurnal ilmu hukum*, 4.02 (2020), 87
- Liu dkk, 'kedudukan kementerian negara dalam sistem pemerintahan negara republik indonesia', 2022, 10 (5)
- Molki Akhmad, 'Analisis Perbandingan Administrasi Publik Negara China Dan Rusia', *Journal of History and Social Sciences*, 3.4 (2024), 63
<<https://doi.org/10.24853/penta.1.1.63-79>>
- Octovina, ribkha annisa, "sistem presidensial di indonesia". 4.2 (2018), 247–51
- Setiawan, irfan, 'penerapan sistem pemerintahan indonesia ditinjau dari pendekatan berbasis teori maupun praktik', *ejournal.ipdn.ac.id*, 2021, 49–59
- Sukhoyya, ahmad wildan, 'dampak pengesahan uu no 61 tahun 2024 tentang perubahan uu no 39 tahun 2008 tentang kementerian negara terhadap stabilitas keuangan negara', 61, 2024
- Sugianto Bambang, 'Hukum Administrasi Negara Sejarah Hukum Administrasi Negara', *Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, 2022, 1
- Tim kementerian keuangan, 'informasi apbn 2024', 2024
- 'united nations economic and sosial commission for asia and the pacific "what is good governance?"', 1997

Berita

- ‘DPR Dan Pemerintah Saat Ini Dinilai Melakukan Praktik ”Abusive” Legislasi - Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (Wantimpres RI)’
<<https://wantimpres.go.id/id/newsflows/dpr-dan-pemerintah-saat-ini-dinilai-melakukan-praktik-abusive-legislasi/>> [accessed 24 November 2025]
- ‘Pakar Hukum Tata Negara Sebut Nomenklatur Kementerian Hak Prerogatif Presiden Terpilih - Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (Wantimpres RI)’ <<https://wantimpres.go.id/id/newsflows/pakar-hukum-tata-negara-sebut-nomenklatur-kementerian-hak-prerogatif-presiden-terpilih/>> [accessed 24 November 2025]
- ‘Pembatasan Bakal Dihapus, Jumlah Kementerian Diserahkan Ke Presiden - Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (Wantimpres RI)’
<<https://wantimpres.go.id/id/newsflows/pembatasan-bakal-dihapus-jumlah-kementerian-diserahkan-ke-presiden/>> [accessed 24 November 2025]
- ‘Perbandingan Jumlah Kementerian Di Indonesia, AS, Rusia, Dan India’, *Tempo*
<<https://www.tempo.co/politik/perbandingan-jumlah-kementerian-di-indonesia-as-rusia-dan-india--9458>> [accessed 18 November 2025]
- ‘Perbandingan Jumlah Kementerian Di Indonesia Dengan AS, China, Dan India, Siapa Terbanyak?’, *Merdeka.Com*, 2024
<<https://www.merdeka.com/dunia/perbandingan-jumlah-kementerian-di-indonesia-dengan-as-china-dan-india-siapa-terbanyak-219433-mvk.html>> [accessed 18 November 2025]
- ‘Pakar Hukum Tata Negara Sebut Nomenklatur Kementerian Hak Prerogatif Presiden Terpilih - Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (Wantimpres RI)’ <<https://wantimpres.go.id/id/newsflows/pakar-hukum-tata-negara-sebut-nomenklatur-kementerian-hak-prerogatif-presiden-terpilih/>> [accessed 24 November 2025]
- ‘Pembatasan Bakal Dihapus, Jumlah Kementerian Diserahkan Ke Presiden - Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (Wantimpres RI)’
<<https://wantimpres.go.id/id/newsflows/pembatasan-bakal-dihapus-jumlah-kementerian-diserahkan-ke-presiden/>> [accessed 24 November 2025]
- U.S. Government, ‘The Executive Branch | The White House’, *The White House*, 2021 <<https://www.whitehouse.gov/government/executive-branch/>> [accessed 18 November 2025]
- Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, ‘Kabinet Indonesia Bersatu’
<<https://setkab.go.id/kabinet-indonesia-bersatu/>> [accessed 19 November 2025]
- Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, ‘Kabinet Indonesia Maju’
<<https://setkab.go.id/kabinet-indonesia-maju/>> [accessed 19 November 2025]

Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, 'Kabinet Kerja'

<<https://setkab.go.id/kabinet-kerja/>> [accessed 19 November 2025]

Sekretaris Kabinet Republik Indonesia, 'Kabinet Merah Putih'

<<https://setkab.go.id/kabinet-kerja/>> [accessed 19 November 2025]



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A